

**Kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit berdasarkan undang-undang kepailitan dan pkpu no 37 Tahun 2004: Studi kasus PT Kayamatex VS PT SK Keris perkara nomor: K.N/2006) = Receivership and administrator authority in management and settlement of bankrupt debtor asset based on Undang-Undang Kepailitan dan PKPU no 37 tahun 2004 (case study PT Kaya Matex vs PT SK Keris case number:013 K/N/2006)**

Shalahuddin Suriadiredja, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20270601&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai kepailitan debitor pailit yang mempunyai asset lebih besar dari utang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana batas kewenangan kurator terkait pengurusan dan pemberesan harta pailit melebihi seluruh tuntutan kreditor, tujuan ialah untuk mengetahui sejauh mana kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dilakukan dalam hal harta pailit lebih besar dari utang, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukumnormatif yaitu penelitian kepustakaan.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kemudahan dalam menjatuhkan pailit kepada debitor. Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip kewajaran dapat digunakan dalam membatasi kewenangan kurator pada waktu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam hal hartga pailit lebih besar dari utang.

.....This research examined about bankrupt debtor's bankruptcy which has asset bigger than it's debt. The main issues in this research is how the receivership authority in doing management and settlement of bankruptcy assets can be limited when debtor asset is bigger than it's debt. The main purpose of this research is to know how far the receivership authority in doing management and settlement of bankruptcy assets can be implement when the debtor asset is bigger than it's debt. The research method used in this research is normative law research which is a library research.

This research found that there was simplicity in pronounce bankruptcy verdict to a debtor. This research also found that fairness principle can be use to limiting receivership authority in doing management and settlement of bankruptcy assets when the asset is bigger than it's debt.